



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PP 39
TRIWULAN II
TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL

**Kementerian
Perindustrian**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur kami munajatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan nikmat kesehatan kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2021 telah selesai disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Kementerian Perindustrian.

Jakarta, Juli 2021
INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	1
I.3. Struktur Organisasi.....	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	8
A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	8
B. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal	10
C. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2021.....	10
D. Rencana Aksi	13
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	31
III.1. Analisa Hasil Capaian dan Anggaran.....	31
III.2. Kegiatan Inspektorat Jenderal.....	34
III.3. Hambatan dan Kendala.....	54
III.4. Langkah Tindak Lanjut.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	10
Tabel 2 Tabel Pengukuran Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021	10
Tabel 3 Program Inspektorat Jenderal	10
Tabel 4 Rencana Aksi Inspektorat Jenderal TW II TAHUN 2021.....	13
Tabel 5 Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2021.....	32
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Maret 2021 & 30 Juni 2021	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	Error! Bookm
Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat I	4
Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat II	5
Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat III	6
Gambar 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV	7

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

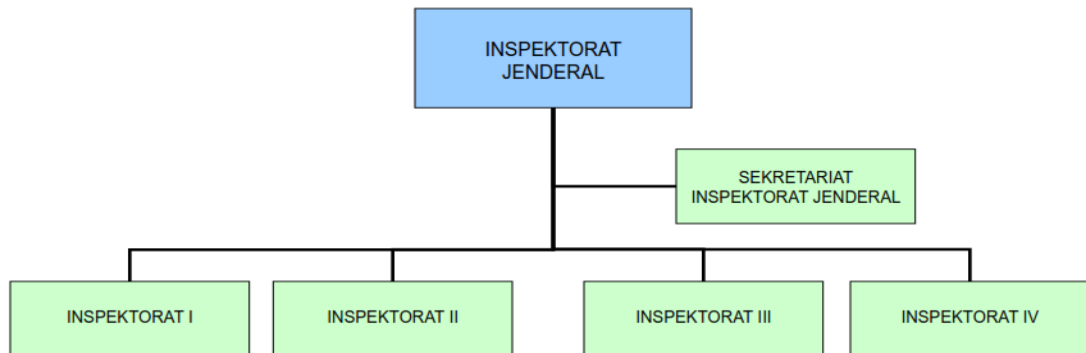
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- c) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- d) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- f) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- g) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal

Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari dua unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal yaitu 9 satuan kerja SMK, 12 satuan kerja Politeknik, dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri (BDI). Tata organisasi Inspektorat I meliputi:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

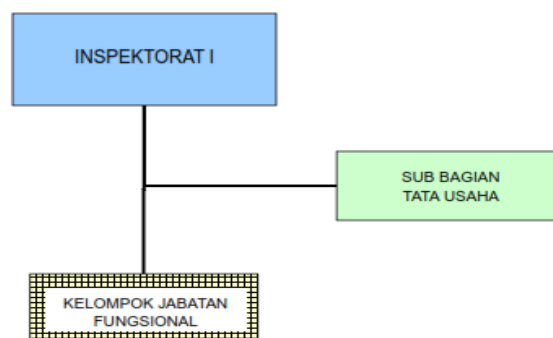
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah Auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang, yang terdiri dari:

- a) Auditor Utama: 1 orang;
- b) Auditor Madya: 1 orang;
- c) Auditor Muda: 6 orang;
- d) Auditor Pratama: 7 orang.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

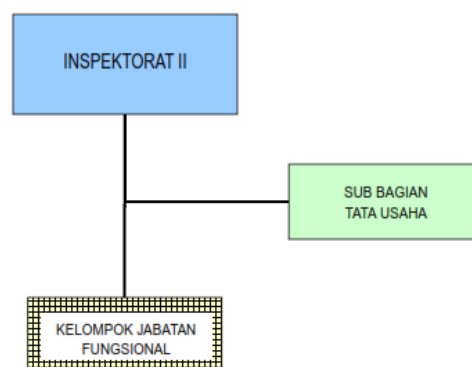
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
 - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2021 ini, Inspektorat II memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) orang Inspektur;
- b) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Auditor: 14 orang;
- d) Pelaksana: 2 orang.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari :

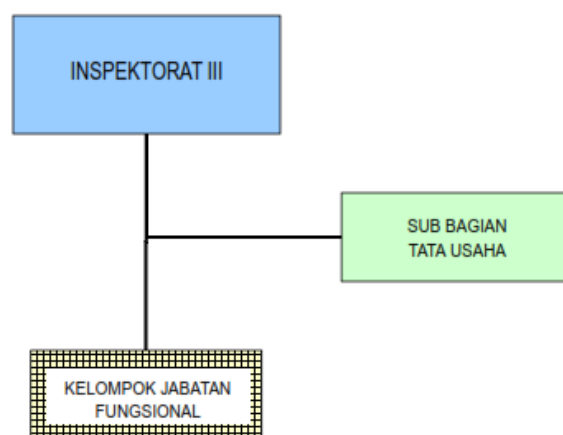
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.

Inspektorat IV terdiri dari :

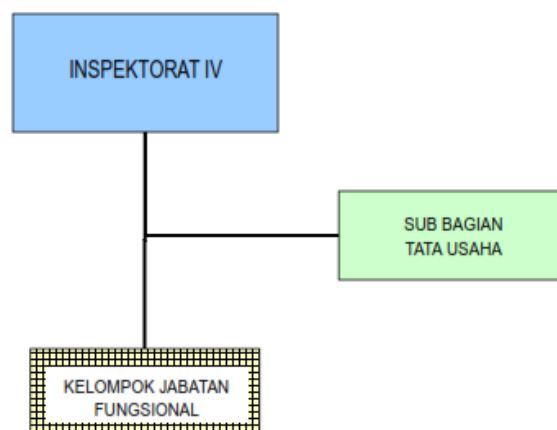
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



Gambar 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”* yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	71%
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3

B. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang telah disahkan dalam bentuk perjanjian kinerja yang cara pengukurannya dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 2 Tabel Pengukuran Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan <i>Quality Assurance</i> BPKP terhadap Kementerian Perindustrian
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

C. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3 Program Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I - Evaluasi Kegiatan Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Laporan - 121 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan -1 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Laporan - 13 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
		- Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I - Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	- 1 Laporan - 5 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat III - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III - Evaluasi Kegiatan Inspektorat III	- 3 Laporan - 109 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan -5 Laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat IV - Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV	- 5 Laporan -17 Laporan -1 laporan -1 laporan -5 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perkantoran - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal - Layanan Sarana Internal - Layanan Pengawasan Internal - Layanan Monitoring & Evaluasi Internal - Bantuan Produk 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Layanan - 1 Layanan -1 unit -2 laporan -13 Laporan -200 Paket

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2021 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp 37,331,257,000.

D. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal. pada triwulan II, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Rencana Aksi Inspektorat Jenderal TW II TAHUN 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab		
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan			
Perspektif Pemangku Kepentingan							
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1.	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4%	<p>IR I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Pengawasan oleh Pimpinan (Binwas Bogor, Binwas Jakarta, Binwas Yogyakarta, Binwas Surabaya-Kendal) • Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi • Koordinasi Konsultasi dan Pendampingan Pelaksanaan Manajemen Risiko dan Kegiatan Berisiko Tinggi • Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP (Penilaian SAKIP Setjen dan BPSDMI) • Pelaksanaan Pelaporan Keuangan/BMN • Koordinasi Pelaporan Keuangan dan BMN • Reviu RKAKL Setjen dan BSDMI <p>IR II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian SAKIP Eselon II ILMATE, IKMA, BPIPI • Penilaian SAKIP Eselon I • Audit Dana Dekonsentrasi • Evaluasi Hibah BMN <p>IR III:</p>	<p>IR I:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menunggu hasil pemeriksaan dari BPK-RI. Hasil indikator kinerja ini diharapkan dapat dilihat pada Triwulan III ✓ Koordinasi Penyusunan peta risiko pada Politeknik STTT Bandung, SMAK Bogor ✓ Audit Kinerja dan pengelolaan keuangan/BMN pada Politeknik PTKI ✓ Melakukan penilaian dan evaluasi SAKIP pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal ✓ Audit Pengelolaan Keuangan/BMN pada SMAK Padang, Politeknik ATI Padang, SMK/SMTI Pontianak, BDI Denpasar <p>IR II:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I & II pada Ditjen IKMA & Ditjen ILMATE 	IR I, IR II, IR III, IR IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
			<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan Layanan Operasional Pimpinan • Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas layanan rumah tangga dan perlengkapan satuan kerja • Koordinasi Penyusunan Program BPPI • Pendampingan Pelaksanaan Audit Eksternal oleh BPK untuk LK 2020 • Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal • Evaluasi SAKIP Es I / Audit Balai Besar dan Baristand & Konsultasi • Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Internal dan Eksternal serta Penguatan Pengawasan di Lingkungan BPPI • Persiapan Konsinyering Pengelolaan PNBPN di lingkungan BPPI • Pelaksanaan Konsinyering Pengelolaan PNBPN 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan audit dana dekonsentrasi pada Provinsi Bali, Sumatera Selatan, Maluku, Jawa Barat, Riau, DI Yogyakarta, Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Utara, NTB, Maluku Utara, NTT, Jambi, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan ✓ Verifikasi penyelesaian hibah BMN pada Ditjen IKMA ✓ Melakukan pengawalan penyelesaian Hibah BMN pada Kabupaten Pati, Rembang, Tasikmalaya, Batang, Pekalongan, Lampung, dan Lombok Barat ✓ Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE & IKMA <p>IR III:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penilaian Monev SAKIP Eselon I pada BPPI dan Itjen ✓ Audit Internal program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenperin 	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
			<p>IR IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit P3DN • Audit Kinerja IKFT, P3DN, IA, KPAIL • Cek Fisik IKFT, P3DN, IA, KPAIL <p>Ses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan Pendampingan / pengawalan kegiatan berisiko tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan Reviu RKAKL terkait penghematan tunjangan pada satker cakupan tugas Ir III <p>IR IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro ✓ Penyelesaian Hibah BMN Ditjen IKFT ✓ Reviu revisi anggaran Ditjen IKFT ✓ Reviu Revisi DIPA ke-3 Ditjen KPAIL ✓ Koordinasi Penyelesaian Pemindahtanganan BMN Ditjen Industri Agro ✓ Pengawasan dan peninjauan tapping Menteri dalam rangka persiapan kegiatan Hannover Messe 	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
	2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8%	<p>IR I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri • Audit STTT Bandung, SMTI Pontianak, AKA Bogor, SMAK Bogor, STMI Jakarta, SMTI Lampung, BDI Jakarta, APP Jakarta, ATK Yogyakarta, SMTI Yogyakarta, BDI Yogyakarta, Akom Solo, BDI Surabaya, Politeknik Kendal, BDI Denpasar <p>IR II & IV: -</p> <p>IR III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Workshop Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tahun 2020 dan Semester I 2021 <p>Ses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja , Audit Khusus, Reviu RKAKL 	<p>IR I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Kinerja dan BMN pada PTKI Medan • Audit Kinerja dan BMN pada BDI Medan • Audit Kinerja dan BMN pada SMK-SMTI Padang • Audit Kinerja dan BMN pada BDI Padang • Audit Kinerja dan BMN pada BDI Denpasar <p>IR II: berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilaksanakan yaitu hasil audit pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen ILMATE, terdapat 24 temuan audit dan 38 rekomendasi • BPIPI Sidoarjo terdapat 7 temuan Audit dan 8 rekomendasi <p>Pada TW II ini belum dapat diukur karena belum dapat diketahui berapa jumlah temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.</p>	IR I, IR II, IR III, IR IV
	3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	<p>IR II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit khusus • Peningkatan peran pengawasan lainnya <p>IR III:</p>	<p>IR I & III:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sampai dengan akhir Juni, belum ada pengaduan berkadar pengawasan (pelaksanaan pada 	IR I, IR II, IR III, IR IV, Ses ITJEN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan koordinasi pengelolaan BMN pada satker di lingkungan BSKJI • Pembinaan dan koordinasi pengelolaan BMN Ses: <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengawasan aspek kepegawaian dan hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian • Koordinasi pelaksanaan klinik konsultasi pengawasan • Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan konsultasi hukum 	<p>Triwulan III)</p> <p>IR II, IR IV, & Ses:</p> <p>✓ Hasil pengaduan berdasarkan laporan Klinik dan belum ada pengaduan hingga akhir Juni</p>	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
	4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91.5%	<p>IR III:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi Perencanaan Kerja dan Anggaran BPPI; <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Revisi Anggaran • Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran • Penyusunan Rencana PNB dan Peraturan Tarif PNB • Bimtek dan sosialisasi bidang penganggaran • Pembinaan satker vertikal • Penyusunan Laporan Akhir ○ Persiapan & pelaksanaan Bimtek ○ Penyusunan Laporan ○ Pelaksanaan Kegiatan pelayanan Operasional Perkantoran ○ Pelaksanaan penyusunan Renstra BSKJI ○ Koordinasi Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan data & informasi, kehumasan, dan pelayanan publik <p>IR IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Evaluasi SAKIP Es II ○ Pendampingan SAKIP Es I <p>SES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindaklanjut 	<p>IR II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan internal telah dilakukan pada Ditjen ILMATE dengan 24 temuan audit dan 38 rekomendasi • Pengawasan internal telah dilakukan pada BPIPI Sidoarjo dengan 7 temuan audit dan 8 rekomendasi <p>SES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pada bulan Juni telah dilaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan internal; ○ Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI; 	IR I, IR II, IR III, IR IV, Ses

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
						<ul style="list-style-type: none"> o Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Penyelesaian Kerugian Negara Periode Semester I Tahun 2021, dengan Tim Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI dan Seluruh Satker Kemenperin telah selesai dilaksanakan pada tanggal 9-11 Juni 2021. 	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Koordinasi PMPRB • Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Panel I Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Unit Eselon I; 	Ses Itjen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
				<ul style="list-style-type: none"> Panel II Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Unit Eselon I dan Unit Pusat/Tingkat Kementerian pelaksanaan tanggal 14 Juni 2021; Panel III Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Unit Eselon I dan Unit Pusat/Tingkat Kementerian dan Pemaparan Hasil PMPRB Kementerian Perindustrian Tahun 2021 oleh Seluruh Asesor Unit Kerja Eselon I dan Unit Pusat/Tingkat Kementerian, pelaksanaan 	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
				<p>tanggal 16 Juni 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian dan Pengisian Hasil PMPRB Serta Mengunggah Dokumen Pendukung PMPRB ke dalam Aplikasi PMPRB Kementerian PAN dan RB Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Unit Pusat Area Penguatan Pengawasan. Pelaksanaan pada tanggal 17 Juni 2021; 	
	2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Sosialisasi penilaian SPIP yang terintegrasi pada tanggal 30 Juni 2021 • Penilaian maturitas SPIP baru akan dilaksanakan pada akhir triwulan III dan pada triwulan IV 	IR I, IR II, IR III, IR IV, Ses Itjen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab		
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan			
Perspektif Proses Bisnis Internal							
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1.	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	<p>IR I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat I <p>IR III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan sarana dan perlengkapan perkantoran <p>Ses:</p> <ul style="list-style-type: none"> Monev pelaksanaan kegiatan Itjen Evaluasi dan pembinaan kegiatan di luar negeri Pelaksanaan penelaahan sejawat 	<p>IR I, IR III, IR IV:</p> <p>Pelaksanaan pengawasan telah sesuai standar seperti reuiu, audit, kegiatan consulting, saat ini capaian masih 20% (evaluasi Internal)</p> <p>IR II: Telah disusun dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisi PKPT Tahun 2021 ✓ Revisi Anggaran TA 2021 ✓ Laporan PP39 TW I & II/2021 ✓ KAK dan RAB TA 2022 <p>Setitjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum dilaksanakan, rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan III 	IR I, IR II, IR III, IR IV, Ses Itjen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
	2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Reviu LAKIP Itjen dan Setitjen • Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 • Penyusunan/Penyempurnaan Sistem manajemen mutu ISO dan SOP-AP • Penilaian SAKIP Eselon II & Eselon I • Pra Evaluasi Sakip Itjen • Peningkatan kerjasama SDM Pegawai Itjen JPT dan JFU • Peningkatan pengembangan kompetensi pegawai Itjen • Penerbitan Majalah Solusi • Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja • Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Pelaporan Hasil Pengawasan • Penyusunan dan Revisi RKAKL 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dilaksanakan penyusunan dan reviu LAKIP Itjen dan Set Itjen Tahun 2020 ✓ Telah dilaksanakan penyusunan perjanjian kinerja ✓ Telah dilaksanakan pra evaluasi SAKIP unit eselon II di lingkungan Itjen dan saat ini masih berlangsung penilaian Sakip Eselon I 	Set Itjen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
	3. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	Koordinasi Pengadaan Perangkat Pengolah data dan komunikasi	IR II: ✓ Audit Tematik Ditjen ILMATE ✓ Audit Tematik BPIPI Setitjen: Telah terealisasi pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pada bulan Juni, yaitu: -Tablet: 110.495.000 dan -Laptop: 164.340.000	Ir I, II, III, IV, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
Learn & Growth Perspective					
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Sistem Informasi Pengawasan untuk Pelaksanaan Audit yang dapat dipergunakan oleh Auditor	25%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan Informasi Pengawasan ○ Pemeliharaan Website inspektorat Jenderal ○ Pengelolaan Media Informasi pengawasan ○ Penerbitan Majalah Solusi ○ Aplikasi Website Itjen dapat dihidupkan kembali jika ada pembayaran dimuka 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan informasi masih dalam tahap pengembangan ○ Majalah Solusi masih dalam tahap penyelesaian 	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	2. Penyesuaian Pedoman/Prosedur Pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	55%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Itjen ○ Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan ○ Penyusunan Peta Proses Bisnis Itjen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Beberapa pedoman masih dalam proses penyelesaian; ○ Penyusunan SK tim penilai angka kredit dan tim sekretaris penilaian angka kredit 	Sekretariat Inspektorat Jenderal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab	
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan		
				<ul style="list-style-type: none"> ○ Evaluasi Kelembagaan Internal dan Organisasi Itjen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pembahasan penanggung jawab area perubahan pada Reformasi Birokrasi 	
	3. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	IR I: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi Penyusunan Dokumen PKPT IR II: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan Program Kerja dan Anggaran ○ Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas IR III: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan Program Kerja dan Anggaran ○ Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas ○ Peningkatan Hubungan Antar Lembaga/Instansi/satker terkait IR IV: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyelesaian Hibah BMN Setitjen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi Program Pengawasan ○ Bimbingan dan Pengawasan Aspek Program di Lingkungan Kemenperin ○ Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi 	Ir I: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dilaksanakan evaluasi PKPT IR II: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelaksanaan Audit Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian Provinsi, Verifikasi Hibah BMN, Pengawasan Hibah BMN ✓ Pada TW II capaian realisasi 12% yaitu 3 dari 25 jenis kegiatan Inspektorat II dalam PKPT Setitjen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaksanaan pengawasan masih berjalan disesuaikan dengan kondisi pandemic saat ini 	Ir I, II, III, IV, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab		
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan			
				<ul style="list-style-type: none"> o Perbaiki Peraturan Kinerja o PP 39 Itjen dan Set Itjen TW II Tahun 2021 	<ul style="list-style-type: none"> o PP 39 TW II Set Itjen telah selesai disusun pada 8 Juli 2021 dan PP 39 TW II Itjen selesai disusun pada tanggal 14 Juli 2021. 		
		4.	Tingkat Perolehan Data dan Informasi Pengawasan yang Memadai	90%	Pemutakhiran Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> o Kemudahan dalam perolehan data dan informasi pengawasan terlaksana dengan baik 	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Arsiparis)
		5.	Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan Perannya	90%	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	<p>IR II: Realisasi capaian kinerja pada TW II sesuai dengan 3 kegiatan yang dilaksanakan dan sesuai peran penugasannya, yaitu Kegiatan Verifikasi Hibah Ditjen IKMA, Reviu RKA-BUN BMDTP pada Ditjen ILMATE, dan reviu usulan revisi anggaran Ditjen ILMATE.</p> <p>IR I, III, IV & Setitjen: Pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan penugasan SDM dan telah sesuai</p>	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian)

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
						dengan perannya pada masing-masing Inspektorat.	
		6.	Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penilaian SAKIP Eselon I ○ Koordinasi Analisis & Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan ○ Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait Isu-isu aktual bidang industri 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penilaian SAKIP Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan pada bulan Mei 2021 ○ Koordinasi pelaksanaan PMPZI (Persiapan Penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dari sisi Penyelesaian 	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab		
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan			
					Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Pemeriksaan BPK-RI)		
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	1.	<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelatihan di kantor sendiri (PKS) atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ PKS Penyusunan SKP Tahun 2021 untuk JF peralihan dan staff; ○ PKS penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Auditor ○ PKS Penilaian SAKIP ○ PKS Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ○ PKS Persamaan Persepsi Pelaksanaan Perjalanan Dinas; ○ PKS Penilaian Pembangunan 	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ Zona Integritas; ○ PKS Overview Manajemen Risiko Indeks (MRI) ○ PKS Persamaan Persepsi Penilaian Zona Integritas ○ PKS Mekanisme Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional 	
	2. Persentase AP/IP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi Pengembangan SDM ○ Pedoman dan kenaikan pangkat diklat-diklat ○ Keikutsertaan diklat pengembangan SDM Itjen ○ Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA ○ Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 ○ Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Itjen ○ Koordinasi Pembinaan Kepegawaian ○ <i>Capacity Building</i> Pegawai Itjen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS angkatan 1 dan 2 tahun 2020 ○ Penilaian dan penetapan angka kredit dalam tahap penyusunan daftar usulan ○ Pembahasan Penyusunan SKP Tahun 2021 untuk JF Peralihan dan Staff ○ Koordinasi Terkait SK Pensiun atas nama Kusmi Iriyanto; ○ Melaksanakan 	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN II		Penanggung Jawab	
			Rencana Kegiatan dengan target 50%	Realisasi Kegiatan		
					koordinasi pegawai yang akan purna tugas 3 tahun kedepan untuk mengikuti pelatihan MPP; <ul style="list-style-type: none"> o Tidak dilaksanakannya <i>Capacity Building</i> karena pandemi 	
	3. Tingkat Kepatuhan terhadap Kode Etik Auditor	92%	<ul style="list-style-type: none"> o Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan, dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan 	Telah disediakan informasi tentang hukum yang dapat diakses melalui hukumonline.com serta pencetakan informasi hukum dan referensi pengawasan	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian)	
	4. Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan Fasilitas Perkantoran o Pembayaran Gaji dan Tunjangan o Honorarium Operasional o Koordinasi dan layanan pimpinan o Pelayanan Umum & Rapat Kedinasan o Koordinasi dan sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN o Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan o Pemeliharaan Sarana dan prasarana operasional kantor 	Telah dilaksanakan secara rutin hingga Bulan Juni 2021	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Koordinator Kepegawaian, Program, dan Keuangan)	

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Analisa Hasil Capaian dan Anggaran

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi anggaran sebanyak tiga (3) kali. Pagu awal sebesar Rp 40.643.630.000. Revisi pertama dan kedua dilakukan pada triwulan I dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan maka Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dan dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal penghematan belanja Kementerian/Lembaga. Dengan adanya penghematan sekitar Rp 2,312,373,000 yang berasal dari tunjangan kinerja THR dan Gaji ke-13, maka total pagu Inspektorat Jenderal berubah menjadi Rp 37,331,257,000.

Kegiatan Inspektorat Jenderal pada triwulan II ini telah terlaksana dengan cukup baik, Namun, pada akhir Juni ini kondisi pandemi Covid-19 memburuk dilakukan PPKM di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang *work from office* (WFO).

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian pada Triwulan II Tahun 2021 (April - Juni) mencapai Rp 15,552,754,986,- atau 41.66 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 37,331,257,000,-.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW II tahun 2021 :

Tabel 5 Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2021

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan II		Realisasi s.d. Triwulan II		Sisa Anggaran s.d. Triwulan II	
		Keuangan (Rp.)	%	Keuangan (Rp.)	%	J u m l a h (Rp.)	%
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	1,880,000,000	548,603,531	29.18	875,193,503	46.55	1,004,806,497	53.45
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	1,880,000,000	573,254,875	30.49	695,111,177	36.97	1,184,888,823	63.03
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	1,880,000,000	450,059,768	23.93	601,463,481	31.99	1,278,536,519	68.01
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	1,880,000,000	602,298,481	32.04	721,805,184	38.39	1,158,194,816	61.61
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	29,811,257,000	8,654,948,025	29.03	12,659,181,641	42.46	17,152,075,359	57.54
T O T A L	37,331,257,000	4,723,590,306	11.92	15,552,754,986	41.66	21,778,502,014	58.34

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Maret 2021 & 30 Juni 2021

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	19,779,464,000	2,942,337,350	14.88	16,837,126,650
2	52 Belanja Barang	19,274,166,000	1,781,252,956	9.24	17,492,913,044
3	53 Belanja Modal	590,000,000	0	0.00	590,000,000
Jumlah		39,643,630,000	4,723,590,306	11.92	34,920,039,694
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto</i>					
Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 30 Juni 2021					
	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	17,467,091,000	7,290,580,375	41.74	10,176,510,626
2	52 Belanja Barang	19,274,166,000	7,674,629,632	39.82	11,599,536,368
3	53 Belanja Modal	590,000,000	578,554,980	99.58	2,455,020
Jumlah		37,331,257,000	15,552,754,986	41.66	21,778,502,014
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto</i>					

Berdasarkan perbandingan data diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perubahan pagu pada bulan Juni 2021 sebesar Rp 2,312,373,000 hal ini karena adanya penghematan yang bersumber dari pagu belanja pegawai pada revisi ketiga DIPA pada tanggal 4 Juni 2021, sesuai Surat Pengesahan Nomor SP DIPA-019.06.1.247885/2021. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran terdapat kenaikan sebesar 29.74% dari Triwulan I, dengan komposisi realisasi tertinggi yaitu pada komponen belanja modal, yaitu hampir 100% telah terealisasi.

III.2. Kegiatan Inspektorat Jenderal

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 diperoleh melalui pencapaian pelaksanaan kegiatan Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang didukung sepenuhnya oleh anggaran yang telah ditetapkan setelah revisi ketiga, yaitu Rp 37,331,257,000,-.

Dengan adanya *New Normal*, kegiatan Inspektorat Jenderal yang dapat terlaksana pada Triwulan II (April-Juni) yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan, Pembinaan, dan Pengawalan selama Triwulan II Tahun 2021

a. Inspektorat I:

- Audit kinerja dan pengelolaan keuangan/BMN pada Politeknik PTKI 4 - 10 April 2021;
- Audit kinerja diklat 3 in 1 TA 2019-2020 dan penggunaan akun Covid TA 2020 pada BDI Medan 4 – 10 April 2021;
- Koordinasi hasil perencanaan kinerja dan anggaran pada BPSDMI tanggal 12 April 2021 – 16 April 2021;
- Melakukan penilaian dan evaluasi SAKIP pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal tanggal 12 April 2021 – 23 April 2021.
- Mengikuti Pelatihan penilaian SPIP terintegrasi bagi APIP K/L mitra kerja di lingkungan kedepuyan bidang perekonomian dan kemaritiman tanggal 25 April s.d. 1 Mei 2021;
- Koordinasi penyusunan peta resiko pada politeknik STTT Bandung tanggal 5 Mei s.d. 7 Mei 2021;
- Koordinasi penyusunan peta resiko pada SMAK Bogor tanggal 5 Mei 2021 s.d. 7 Mei 2021;
- Koordinasi hasil perencanaan kinerja dan anggaran pada BPSDMI tanggal 18 Mei 2021 s.d. 20 Mei 2021;
- Melakukan koordinasi pada BDI padang tanggal 22 Mei 2021 s.d. 24 Mei 2021;
- Reviu Revisi anggaran pada Sekretariat Jenderal tanggal 27 Mei 2021 s.d. 3 Juni 2021.

- Pemantauan lapangan hasil perencanaan penimbunan dan pagar pada Poltek Kendal tanggal 2-4 Juni 2021;
- Sosialisasi penilaian maturitas SPIP Kementerian Perindustrian pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal tanggal 2-4 Juni 2021;
- Audit pengelolaan keuangan/BMN pada SMAK Padang tanggal 9 Juni 2021;
- Audit pengelolaan keuangan/BMN pada Politeknik ATI Padang tanggal 6-10 Juni 2021;
- Sosialisasi penilaian maturitas SPIP Kementerian Perindustrian pada Satker Padang tanggal 6-8 Juni 2021;
- Audit kinerja dan pengelolaan keuangan pada SMK/SMTI Padang tanggal 6-12 Juni 2021;
- Sosialisasi penilaian maturitas SPIP Kementerian Perindustrian pada Satker Padang tanggal 6- 8 Juni 2021;
- Mengkoordinir tim pengawasan rencana pembangunan gedung pada AKOM Solo dan IFPK Kendal tanggal 15-18 Juni 2021;
- Pengawasan progres dan hasil pengadaan tanah, peralatan/mesin dan diklat 3 in 1 pada Satker Yogyakarta tanggal 15-17 Juni 2021;
- Pengawasan progres pembangunan gedung PIDI 4.0 pada BPSDMI tanggal 16-18 Juni 2021;
- Audit kinerja dan pengelolaan keuangan pada BDI Denpasar tanggal 20-26 Juni 2021;
- Audit pengelolaan keuangan keuangan/BMN pada SMK/SMTI Pontianak tanggal 22-27 Juni 2021;
- Pemantauan progress penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP TA 2020 tanggal 28-30 Juni 2021;
- Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Balai Dilat Industri Medan dan PTKI Medan;
- Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada AKOM Solo tanggal 28-30 Juni 2021;
- Sosialisasi penilaian maturitas SPIP Kementerian Perindustrian pada Satker Kendal, Solo dan Yogyakarta tanggal 15-18 Juni 2021;

- Sosialisasi penilaian maturitas SPIP Kementerian Perindustrian pada Satker Bandung dan Bogor tanggal 28-30 Juni 2021;
- Sosialisasi penilaian maturitas SPIP Kementerian Perindustrian pada BDI Denpasar tanggal 23-26 Juni 2021;
- Pendampingan kunjungan kerja Inspektur I ke UPT Kemenperin Wilayah Jakarta tanggal 22 Juni 2021;
- Reviu revisi anggaran pada Sekretariat Jenderal tanggal 27 Mei – 2 Juni 2021;
- Reviu revisi anggaran pada SMTI Padang tanggal 31 Mei – 2 Juni 2021;
- Mengikuti Sosialisasi pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan panduan Teknis Audit Pemanfaatan BMN bagi APIP K/L.

b. Inspektorat II:

- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 5-10 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 446/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Melakukan Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 19-27 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 516/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Melakukan Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 19-27 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 516/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 26-30 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 521/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 26-30 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 552/IJ-IND/ST/4/2021
- ✓ Kegiatan *Consulting* dengan menghadiri undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Subsitusi Import Kementerian Perindustrian pada tanggal 1 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 455/IJ-IND/ST/3/2021

- ✓ Kegiatan *Consulting* dengan melakukan verifikasi penyelesaian hibah BMN pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka pada tanggal 1- 30 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 494/IJ- IND/ST/4/2021
- ✓ Kegiatan *Cosulting* dengan menghadiri undangan Rapat Koordinasi lanjutan persiapan pemilihan penyedia katalog elektronik sectoral pada tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 465/IJ- IND/ST/4/2021.
- ✓ Kegiatan *Cosulting* dengan melakukan pengawalan penyelesaian hibah BMN di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang pada tanggal 5-9 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 448/IJ-IND/ST/3/2021.
- ✓ Kegiatan *Cosulting* dengan melakukan pengawalan penyelesaian hibah BMN di Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 5-7 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 447/IJ-IND/ST/3/2021.
- ✓ Kegiatan *Cosulting* dengan menghadiri undangan Rapat Koordinasi terkait CEIR pada tanggal 8 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 476/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Kegiatan *Consulting* dengan menghadiri undangan Rapat evaluasi progress hibah Kementerian Perindustrian pada tanggal 8 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 475/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Kegiatan *Consulting* dengan menghadiri undangan Rapat Persiapan Penilaian UPT menuju WBK/WBBM Tahun 2021 pada tanggal 8 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 474/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Kegiatan *Consulting* dengan melakukan kunjungan ke PT VIVO Mobile Indonesia pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 477/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Kegiatan *Consulting* dengan menghadiri undangan rapat Stranas PK pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 480/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Kegiatan *Consulting* dengan melakukan kunjungan ke PT Adi Reka Mandiri pada tanggal 13 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 481/IJ- IND/ST/4/2021.
- ✓ Kegiatan *Consulting* dengan melakukan penyampaian Daftar IUI yang belum efektif hingga Desember 2020 pada tanggal 15-16 April 2021 berdasarkan Surat

Tugas Nomor 510/IJ-IND/ST/4/2021.

- ✓ Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi SAKIP pada tanggal 19 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 525/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Menghadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi STRANAS PK 2021-2022 Cegah Korupsi dari Hulu ke Hilir pada tanggal 13 April 2021 berdasarkan berdasarkan Surat Tugas Nomor 491/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Melakukan pendampingan Program Fasilitasi Membership IKM Go Global di DI Yogyakarta pada tanggal 19-20 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 505/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Melakukan pengawalan penyelesaian hibah BMN di Kabupaten Batang dan Pekalongan pada tanggal 19-23 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 484/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Melakukan pengawalan penyelesaian hibah BMN di Kota Lampung pada tanggal 21-23 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 485/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Melakukan pengawalan penyelesaian hibah BMN di Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21-23 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 486/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Menghadiri Konsinyering Pemutakhiran DIP dan DIK Kementerian Perindustrian Tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 557/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Menghadiri Undangan Pembahasan Instrumen Verifikasi Teknis CEIR berdasarkan Surat Tugas Nomor 592/IJ-IND/ST/V/2021.
- ✓ Menghadiri Rapat Usulan AMMDES Untuk Katalog Elektronik Sekretariat Kementerian Perindustrian berdasarkan Surat Tugas Nomor 593/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Menghadiri Permintaan PIC Sosialisasi Pengarahan Teknis Pelaksanaan E-SPI tahun 2021 Kementerian dan Lembaga berdasarkan Surat Tugas Nomor 594/IJ-IND/ST/V/2021.
- ✓ Menghadiri webinar *Internal Auditor In Era of Distruptions* berdasarkan Surat Tugas Nomor 597/IJ-IND/ST/5/2021.

- ✓ Melakukan Reviu Revisi POK Direktorat Industri Elektronika dan Telematika berdasarkan Surat Tugas Nomor 599/IJ- IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan verifikasi penyelesaian hibah BMN pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka pada tanggal 1- 30 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 494/IJ- IND/ST/4/2021.
- ✓ Penyusunan Program Pengawasan Inspektorat II TA 2022 berdasarkan surat tugas nomor 619/IJ-IND/ST/V/2021.
- ✓ Verifikasi Penyelesaian Hibah BMN Pada Dirjen IKMA berdasarkan Surat Tugas Nomor 641/IJ-IND/ST/V/2021.
- ✓ Menghadiri Webinar Festival Joglo Semar : Seluk Beluk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk IKM berdasarkan Surat Tugas Nomor 642/IJ-IND/ST/V/2021.
- ✓ Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Dana Dekon Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar berdasarkan Surat Tugas Nomor 627/IJ-IND/ST/V/2021.
- ✓ Menghadiri Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan Panduan Teknis Audit Pemanfaatan BMN bagi APIP Kementerian/Lembaga berdasarkan Surat Tugas Nomor 474/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Melakukan audit pengelolaan dana dekonsentrasi TA 2020.
- ✓ pada Disperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Tugas Nomor 480/IJ-IND/ST/4/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekon TA 2020 pada Disperindag Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Tugas Nomor 650/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekon TA 2020 pada Disperindag Sulawesi Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor 651/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekon TA 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Tugas Nomor 652/IJ-IND/ST/5/2021.

- ✓ Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Dana Dekon pada Disperindag Prov. Sumbar berdasarkan Surat Tugas Nomor 626/IJ-IND/ST/V/2021.
- ✓ Menghadiri Pembahasan Penerimaan Pajak Sektor Industri KBLI 5 berdasarkan Surat Tugas Nomor 673/IJ-IND/ST/V/2021.
- ✓ Koordinasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran tahun 2021 dengan BPKP berdasarkan Surat Tugas Nomor 678/IJ-IND/ST/V/2021.
- ✓ Melakukan Reviu Revisi Anggaran DIPA penghematan anggaran Tunjangan Kinerja (Tunkin) pada Direktorat Jenderal IKMA berdasarkan Surat Tugas Nomor 682/IJ-IND/ST/V/2021 .
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 31 Mei-4 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 648/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 31 Mei-4 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 650/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 7-11 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 651/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tanggal 7-11 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 652/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada tanggal 14-18 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 751/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 14-19 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 752/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada tanggal 21-25 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 789/IJ-IND/ST/5/2021

- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 21-25 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 790/IJ- IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni-2 Juli 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 808/IJ-IND/ST/5/2021
- ✓ Melakukan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi TA. 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 28 Juni-2 Juli 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 809/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Kunjungan Penilaian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat di PTPN X pada tanggal 2-4 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 731/IJ- IND/ST/5/2021.
- ✓ Menghadiri Rapat Revisi Renstra Direktorat Jenderal ILMATE pada tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 732/IJ- IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Verifikasi Penyelesaian Hibah BMN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 2-4 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 785/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Verifikasi Penyelesaian Hibah BMN pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka pada tanggal 2-30 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 788/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Menghadiri Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Perindustrian pada tanggal 4 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 750/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Kunjungan Penilaian Penyertaan Modal Pemerintah pusat di PTPN XI Jawa Timur pada tanggal 14-15 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 784/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Menghadiri Pembahasan Rancangan Permenperin Perubahan Permenperin Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan BMDTP Covid19 pada tanggal 17

Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 812/IJ-IND/ST/5/2021.

- ✓ Menghadiri Acara Business Matching Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) dengan Real Estate Indonesia (REI) pada tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 831/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Menghadiri Sosialisasi Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 832/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Kunjungan Penilaian Penyertaan Modal Pemerintah pusat di PTPN XIV pada tanggal 21-23 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 829/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Reviu RKA BUN Belanja Subsidi BMDTP TA 2021 Direktorat Jenderal ILMATE pada tanggal 22-25 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 839/IJ-IND/ST/5/2021.
- ✓ Melakukan Reviu Usulan Revisi Anggaran Pendalaman Struktur dan Kemandirian Bahan Baku Serta Produksi dan Penguatan Daya Saing Melalui Penurunan Biaya Produksi Direktorat Jenderal ILMATE pada tanggal 22-25 Juni 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 840/IJ-IND/ST/5/2021.

c. Inspektorat III:

- ✓ Penilaian Monev SAKIP Eselon I pada BPPI dan Inspektorat Jenderal (April);
- ✓ Pelaksanaan Pra Audit Internal program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perindustrian (Audit Bulan April pada Inspektorat Jenderal);
- ✓ Pelaksanaan Audit Internal program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perindustrian (Audit Bulan April pada Inspektorat Jenderal).
- ✓ Audit Program dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal;
- ✓ Pelaksanaan PMPRB pada Satker cakupan tugas IR III;
- ✓ Pelaksanaan PMPZI pada satkerCakupan tugas IR III;

- ✓ Reviu RKAKL/Revisi anggaran terkait penghematan tunjangan pada satker cakupan tugas IR III;
- ✓ Pelaksanaan pemutakhiran data dan pemetaan resiko terkait program dan kegiatan pada Satker Baristand Industri Padang;
- ✓ Pelaksanaan pemetaan resiko terkait program dan kegiatan pada Satker BBK Bandung;
- ✓ Pelaksanaan audit program dan kinerja pada Baristand Bandar Lampung dan Palembang.
- ✓ Konsulting dan pengawalan kegiatan beresiko tinggi pada BBT Bandung;
- ✓ Konsulting dalam rangka reviu hibah BMN pada satker BSKJI (Daerah Magetan, Pekalongan, Muncar, Bandung, Pandai Sikek);
- ✓ Audit program dan kegiatan pada Satker Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Manado dan BPPSI Pekanbaru);
- ✓ Reviu RKBMN pada Satker BBKK Jakarta.

d. Inspektorat IV:

- Reviu LK Subsidi BMDTP TA 2020 Audited tanggal 28-30 April 2021;
- Peninjauan Sekretariat Tim Nasional dalam rangka pengawalan Kegiatan Hannover Messe 2021 tanggal 12-16 April 2021;
- Pengawalan dan klarifikasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Hannover Messe 2021 tanggal 12-16 April 2021;
- Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro di Serang tanggal 20-23 April 2021;
- Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro di Wonogiri tanggal 22-24 April 2021;
- Pengawalan dan peninjauan Tapping Menteri dalam rangka persiapan kegiatan Hannover Messe 2021 tanggal 8-9 April 2021;

- Rekonsiliasi Tiga Pihak dalam rangka penyusunan LKKL dan LKPP Tahun 2020, diaudit tanggal 14 April 2020;
- Reviu Revisi Anggaran Ditjen IKFT Tahun 2021 tanggal 13- 16 April 2021;
- Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro di Bandung tanggal 20-23 April 2021;
- Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro di Wonogiri tanggal 22-24 April 2021;
- Penyelesaian Hibah BMN Ditjen IKFT di Surabaya tanggal 5- 7 April 2021;
- Penyelesaian Hibah BMN Ditjen IKFT di Garut tanggal 5-7 April 2021;
- Kunjungan Lapangan dalam rangka Audit Kinerja Ditjen Industri Agro di Batang tanggal 8-10 April 2021;
- Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro di Bekasi tanggal 26-30 April 2021;
- Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro di Serang tanggal 20-23 April 2021;
- Reviu Revisi Anggaran Ditjen IKFT tanggal 13-16 April 2021;
- Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro di Kudus tanggal 26-28 April 2021;
- Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro di Bekasi tanggal 21-23 April 2021;
- Koordinasi Penyelesaian Pemindahtanganan BMN Ditjen Industri Agro tanggal 28-30 April 2021;
- Reviu Revisi DIPA ke-3 Ditjen KPAll tanggal 19-23 April 2021;
- Pengujian Lapangan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro di Pasuruan tanggal 26-30 April 2021.
- Koordinasi Evaluasi kinerja sektor industri kima hulu dan monitoring Assessment INDI 4.0 tanggal 1- 3 Juni 2021;

- Penyelesaian hibah BMN Ditjen KPAll tanggal 2-5 Juni 2021;
- Pendampingan pimpinan melakukan monitoring Assessment INDI 4.0 tanggal 2-4 Juni 2021;
- Pelatihan penilaian SPIP di Bogor tanggal 6-12 Juni 2021;
- FGD pengembangan akses sumber daya industri dan promosi Internasional tanggal 4-6 Juni 2021;
- Finalisasi Permenperin tentang pedoman dan tata cara pengawasan dan pengendalian Industri dalam rangka persiapan harmonisasi di Kemenkumham tanggal 8-10 Juni 2021;
- Kick Off Meeting Pengadaan *Hi Tech Mold* dan Dies Center dalam rangka program pengawasan Ditjen KPAll tanggal 14 Juni 2021;
- Penilaian BMN PMPP Dirjen Industri Agro di Malang tanggal 15-17 Juni 2021;
- Penilaian BMN PMPP Dirjen Industri Agro di Madiun tanggal 16-19 Juni 2021;
- Pembahasan laporan pendahuluan kegiatan pengawasan dan pengendalian gula impor di Tangerang tanggal 23 Juni 2021;
- Kunjungan lapangan dalam rangka Audit Ditjen IKFT di Bandung tanggal 22-24 Juni 2021;
- Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) Ditjen IKFT di Mojokerto tanggal 22-24 Juni 2021;
- *Self-Assessment* dan tim penilai pada satuan kerja Yogyakarta (SMK/SMTI-ATK Yogyakarta) tanggal 30 Juni – 2 Juli 2021;
- Kunjungan lapangan dalam rangka audit Ditjen IKFT ke PT Daria Varia Laboratoria Bogor tanggal 28-29 Juni 2021;
- Kunjungan lapangan dalam rangka audit Ditjen IKFT ke PT Givaudan Indonesia di Depok tanggal 28-29 Juni 2021;
- Reviu Pergeseran alokasi anggaran dan penerbitan DIPA BMDTP Covid 19 sektor Industri Agro TA 2021 tanggal 15-18 Juni 2021;
- Reviu Pagu Anggaran BA BUN 999.08 Ke 999.07 dan usulan anggaran BMDTP Covid 19 TA 2021 Ditjen IKFT tanggal 16 Juni 2021;
- Reviu usulan revisi DIPA Ditjen KPAll TA 2021;

- Reviu anggaran pusat pemberdayaan industri halal tanggal 19-25 Juni 2021;
- Reviu usulan revisi DIPA dalam rangka buka blokir TA 2021 di Jakarta tanggal 21-25 Juni 2021;
- Audit kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil TA 2020.

2. Penyusunan Anggaran Tahun 2022

- Penyusunan Konsep KAK dan RAB Tahun Anggaran 2022;
- Inspektorat Jenderal dalam proses menyusun KAK dan RAB Kegiatan tahun 2022 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor 476/IJ-IND.1/PR/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Perubahan Penyampaian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Blara (RAB) Tahun Anggaran 2022 dengan memerhatikan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang tertuang dalam Surat Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 05920/PP.04.03/Dt.8.2.B/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Penyampaian *update* terkait penyusunan rancangan Rencana Kerja K/L Tahun Anggaran 2022.
- Adapun pagu indikatif Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 40,643,630,000, - dengan rincian per Eselon II sebagai berikut:

Unit Eselon II	Anggaran
Inspektorat I	2,108,753,000
Inspektorat II	2,050,000,000
Inspektorat III	2,050,000,000
Inspektorat IV	2,050,000,000
Sekretariat Inspektorat Jenderal	32,384,877,000

- ✓ Perbaikan indikator pada aplikasi KRISNA Inspektorat Jenderal, dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum diinput.

3. Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan

Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian telah selesai dilaksanakan. Nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal, yaitu 80,10 atau predikat A;
- 2) Penilaian SAKIP Eselon II telah selesai dilaksanakan, dengan perolehan nilai unit Eselon II Inspektorat Jenderal dapat dilihat melalui tabel berikut:

No	Unit Eselon I	KOMPONEN					Nilai	Kategori
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Pencapaian Sasaran/ Kinerja		
		30%	25%	15%	10%	20%		
1	Set Itjen	24.59	20.94	10.72	8.26	16.00	80.51	A
2	IR I	21.84	19.69	10.63	5.67	12.70	70.53	BB
3	IR II	23.74	20.31	12.37	7.05	16.09	79.56	BB
4	IR III	23.74	19.38	12.37	7.91	14.83	78.23	BB
5	IR IV	24.59	21.56	10.99	8.26	14.48	79.88	BB

- 3) Reviu Renstra dan Reviu Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, dan masih perlu adanya revisi nomenklatur dan cara pengukuran indikator kinerja berdasarkan hasil pembahasan Renstra dengan KemenPANRB.
- 4) Melaksanakan evaluasi capaian output Inspektorat secara manual untuk dikirimkan ke bagian keuangan Inspektorat Jenderal
- 5) Melaksanakan reviu renstra Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil temuan Inspektorat III serta evaluasi atas Implementasi SAKIP
- 6) Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan MRI di Lingkungan Kementerian Perindustrian
- 7) Koordinasi pelaksanaan PMPZI menuju WBK dan WBBM dari sisi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pemeriksaan BPK-RI
- 8) Koordinasi Pelaporan Pencapaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Periode B06, pelaksanaan pada tanggal 25 Juni 2021

- 9) Persiapan Survei Penilaian Integritas KPK (e-SPI) dan Penghitungan Sampel dengan KPK (jumlah unit kerja yang dijadikan sampel sudah dihitung dan ditentukan).

4. Dokumen-Dokumen Perencanaan Inspektorat Jenderal

Dokumen perencanaan yang telah diselesaikan pada triwulan II ini antara lain:

- a) Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2021
- b) Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2021

5. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal

Terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- ✓ Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas saldo temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI, dilaksanakan secara rutin, baik melalui media surat menyurat maupun melalui virtual meeting. Berdasarkan keterangan satuan kerja terkait, sulitnya berkoordinasi dengan BPK-RI di luar penugasan Tim Pemantauan Tindak Lanjut karena penyelesaian tindak lanjut tidak hanya berupa dokumentasi/korespondensi surat menyurat, akan tetapi perlu dilakukan komunikasi secara langsung.
- ✓ Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak lanjut atas saldo temuan hasil pengawasan internal, belum didukung oleh media yang memadai seperti aplikasi yang dapat menyimpan bukti dukung tindak lanjut agar lebih mudah menginventarisasi dan lebih mudah dikoordinasikan dengan ketua tim auditor yang memeriksa.
- ✓ Pemutakhiran Tindak Lanjut pada satker Bandung dan Yogyakarta, selesai dilaksanakan pada tanggal 21-23 April 2021 dan 28-30 April 2021
- ✓ Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (verifikasi tahap awal Subbagian PTLHP)
- ✓ Koordinasi dengan Ketua Tim Auditor dalam rangka verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Internal (Tahap Finalisasi), Koordinasi dilakukan dengan 2 metode, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi seperti Whatsapp. Terkait hal ini, maka perlu dilakukan pengembangan sistem informasi sebagai media untuk mempercepat proses verifikasi dokumen dalam rangka menindaklanjuti saldo temuan.
- ✓ Pembahasan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan BPK-RI dan Penyelesaian Kerugian Negara Periode Semester I Tahun 2021, dengan tim pemantauan tindak lanjut BPK-RI dan seluruh satker Kemenperin yang telah dilaksanakan pada 9-11 Juni 2021

- ✓ Berpartisipasi dalam sosialisasi peluncuran Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi yang telah dilaksanakan pada tanggal 12-13 April 2021
- ✓ Menginventarisasi data saldo temuan hasil pemeriksaan BPK-RI per unit kerja
- ✓ Penilaian Mandiri PMPRB telah dilaksanakan Panel I-III
- ✓ Penyampaian dan pengisian hasil PMPRB serta Dokumen pendukung PMPRB ke dalam aplikasi PMPRB KemenPANRB Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Unit Pusat Area Penguatan Pengawasan yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021.

6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang telah dilaksanakan selama Triwulan II (April-Juni 2021) adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi calon peserta diklat SPIP Batch 1 dengan BPKP
- b. Menyusun Laporan hasil penilaian Angka Kredit dan Laporan Monitoring hasil penilaian angka kredit JFA
- c. Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) terkait dengan penilaian SAKIP dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB pada tanggal 23 April 2021
- d. Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) terkait dengan penilaian PMPRB dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB pada tanggal 27 April 2021
- e. Menyusun Laporan penilaian DUPAK periode 1 Juli 2020-31 Desember 2020
- f. Menyusun SK tim penilai Angka Kredit dan tim sekretaris penilaian Angka Kredit
- g. Melaksanakan PKS penilaian ZI (PMPRBZI) dengan narasumber dari KemenPANRB
- h. Melaksanakan PKS Persamaan Persepsi Penilaian Zona Integritas tanggal 28 Juni 2021, narasumber Azka Rianto;

- i. Melaksanakan koordinasi terkait SK pension atas nama Kusmi Iriyanto;
- j. Melaksanakan koordinasi pegawai yang akan purna tugas 3 tahun kedepan untuk mengikuti pelatihan MPP;
- k. Melakukan koordinasi *update* pengisian SITARA (BP TAPERA);
- l. Melaksanakan PKS *Overview* Manajemen Resiko Indeks (MRI)/SPIP New tanggal 31 Mei 2021, dengan Narasumber Oktaviyanto Jimat W;
- m. PKS Mekanisme Perpindahan ke Dalam Jabatan Fungsional tanggal 29 Juni 2021 dengan narasumber Alfiah Rachmiantini (Biro OSDM);
- n. Melakukan koordinasi dokumen Reformasi Birokrasi tentang Pakta Integritas di Lingkungan Inspektorat Jenderal

7. Pengelolaan Keuangan

Kegiatan yang dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan selama Triwulan II (April-Juni 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan yang rutin setiap bulan;
- b. Pelaporan capaian output ke KPPN;
- c. Koordinasi terkait rekonsiliasi keuangan;
- d. Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan;
- e. Koordinasi dengan Biro Keuangan terkait Sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN;
- f. Pencairan gaji ke-13.

8. Pelaksanaan PKPT s.d. Triwulan II

PKPT merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Jenderal serta sebagai dasar untuk menilai kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

PKPT yang dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen evaluasi adalah PKPT awal yang diserahkan oleh masing-masing Inspektorat pada akhir tahun 2020 lalu.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengawasan pada masing-masing Inspektorat belum sesuai dengan perencanaan atau PKPT awal, dikarenakan

perbedaan timeframe dan terdapat pula kegiatan yang tidak dicantumkan di dalam dokumen PKPT.

Pada Inspektorat I, Kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP berdasarkan PKPT terlaksana pada Bulan Maret 2021, namun pada kenyataannya baru terlaksana pada bulan April 2021. Pada bulan Juni 2021 terdapat beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya telah sesuai dengan PKPT, namun terdapat yang belum sesuai, yaitu pelaksanaan Reviu RKA-KL Sekretariat Jenderal dan BPSDMI.


Kegiatan pengawasan Inspektorat II, masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan PKPT. Pada Bulan Mei 2021, Inspektorat II melakukan revisi dokumen PKPT. Namun, Pada Triwulan II ini hanya 12% kegiatan pelaksanaan pada Inspektorat II telah sesuai dengan dokumen PKPT atau 3 kegiatan dari 25 kegiatan pengawasan telah sesuai dengan PKPT.






Pada Inspektorat III, sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Juni 2021 masih melaksanakan kegiatan audit kinerja pada satker cakupan tugas Inspektorat III dan reviu RKAKL pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III.



Pada Bulan April 2021, Inspektorat IV melaksanakan audit kinerja pada Ditjen Agro, penyelesaian hibah BMN, serta audit kegiatan pameran Hannover Messe. Bulan Mei 2021, Inspektorat IV melakukan kegiatan persiapan dan audit pada IKFT. Audit kinerja IKFT ini masih berlanjut hingga Bulan Juni 2021, kemudian Audit kinerja pada KPAlI dan penilaian BMN Industri Agro juga dilaksanakan pada bulan Juni 2021.

Adapun progres capaian dari Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada Triwulan II diinformasikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Progres Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal TW II

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1.4%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan Audit dan Reviu LK-BMN telah dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat ✓ Masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK 	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Keterangan
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Audit Kinerja masing-masing Inspektorat telah dilaksanakan ✓ Reviu RKAKL akan dilaksanakan pada TW III 	
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85%	Penanganan Pengaduan Masyarakat hingga akhir April 2021 telah menerima sebanyak 93 pengaduan. Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti, dilakukan secara online, dan bersifat tidak berkadar pengawasan.	
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	91.5%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka penyelesaian Tindak Lanjut atas Saldo temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan hasil pengawasan internal; ✓ Pelaksanaan Revaluasi BMN sampai tindak lanjut ✓ Tindak lanjut saldo dekonsentrasi dan pemutakhirannya ✓ Pembahasan tindak lanjut audit kinerja BPK ✓ Menginventarisasi Data Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI per unit kerja ✓ Rekomendasi hasil pengawasan internal s.d. 27 Juni 2021 sebesar 37% dari 363 total rekomendasi. 	
		1. Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penilaian Mandiri PMPRB Panel I-III telah dilaksanakan ✓ Pada tanggal 17 Juni telah dilaksanakan penyampaian dan pengisian hasil PMPRB serta mengunggah dokumen pendukung pada aplikasi PMPRB KemenPANRB Unit Eselon I Inspektorat Jenderal dan Unit Pusat Area Penguatan Pengawasan. 	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Telah dilaksanakan sosialisasi penilaian MRI yang terintegrasi pada tanggal 30 Juni 2021	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Keterangan	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1.	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Akan dilaksanakan pada TW III	
		2.	Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Penilaian SAKIP Eselon I & II telah selesai dilaksanakan, hasil A hanya diperoleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Inspektorat I,II, III, dan IV memperoleh nilai BB. Penyusunan/Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-A masih dalam tahap pelaksanaan.	

Keterangan :



: Telah tercapai



: Dalam proses pelaksanaan



: Tidak tercapai

III.3. Hambatan dan Kendala

Pada Triwulan II Tahun 2021, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal terdapat hambatan dan kendala, antara lain:

- 1) Secara umum, tidak ada kendala yang berarti, namun dengan adanya penghematan untuk program vaksinasi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi nasional, biaya operasional tidak dapat di realisasikan sesuai rencana.
- 2) Terdapat biaya operasional yang belum dapat terealisasi karena menunggu hasil revisi anggaran
- 3) Terdapat pengajuan biaya operasional kegiatan yang belum tercatat dalam aplikasi karena pelaksanaan kegiatan mendekati *cut-off time* aplikasi.
- 4) Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Triwulan II tahun 2021 periode Maret-Juni tahun 2021 berjalan dengan lancar tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan pengawasan mengalami perubahan jadwal pelaksanaan agar realisasi anggaran bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Inspektorat II telah melakukan revisi PKPT pada bulan Mei 2021.
- 5) Perbedaan realisasi Anggaran pada aplikasi PP39 dengan Aplikasi SAS, disebabkan sampai dengan laporan ini dibuat ada 7 STPJB yang belum di input oleh bagian keuangan.
- 6) Terdapat ketidaksesuaian realisasi anggaran antara aplikasi PP39 dan Aplikasi SAS yang disebabkan realisasi anggaran dalam aplikasi PP39 masih terdapat SPTJB yang belum keluar Nomor dan Tanggal SP2D-nya.
- 7) Adanya perubahan struktur organisasi, sehingga kurang optimalnya pendelegasian tanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan.
- 8) Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya revisi kegiatan dan realokasi anggaran menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal belum dapat difinalisasi karena masih dalam tahap pembahasan antar pimpinan untuk menyesuaikan indikator kinerja, target, dan cara pengukuran indikator kinerja yang sesuai dengan kondisi Inspektorat Jenderal.

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II ini dan bertepatan dengan era *new normal*, maka Inspektorat Jenderal mengupayakan peningkatan kerjasama yang sinergis sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga realisasi anggaran di PP39 sesuai dengan realiasi anggaran sesungguhnya;
2. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar terlaksana sesuai dengan perencanaan waktu yang ditetapkan pada awal tahun;
3. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait melalui berbagai macam media baik online maupun secara langsung/tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Perlu penjadwalan dan penganggaran kembali setelah situasi pandemi ini lebih kondusif.
5. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk segera mengatasi hambatan penginputan SPTJB pada tahun Anggaran 2021.
6. Berkoordinasi kebagian keuangan dan bagian program agar realisasi kegiatan/program dan keuangan sesuai dengan PKPT.
7. Melakukan revisi anggaran Inspektorat II dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat II.
8. Masing-masing penanggung jawab kegiatan/kordinator kegiatan segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan pelaksanaan antar kegiatan serta mengatur perencanaan kegiatan sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia.
9. Perlu melakukan pembahasan intensif mengenai Renstra Inspektorat Jenderal, jika telah mendekati final, agar segera berkonsultasi lebih lanjut kepada KemenPANRB (Bapak Ananda Juarsa) agar Renstra Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2021 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 (Januari-Juni) mencapai Rp 15,552,754,986,- atau 41.66 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 37,331,257,000,-. Angka-angka capaian kinerja kegiatan tersebut merupakan nilai tertimbang dari kemampuan penyerapan anggaran dari total anggaran yang ada pada Inspektorat Jenderal. Namun, realisasi ini tidak dapat terukur secara *real time* pada aplikasi PP39 dan Monev Perkin di dalam Intranet, karena terdapat perbedaan *cut-off data* yang menimbulkan perbedaan kalkulasi data yang signifikan dan permasalahan ini perlu di perbaiki di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan awal pelaksanaan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Untuk selanjutnya perlu koordinasi internal maupun eksternal untuk menjamin realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan target.

Informasi capaian kinerja Triwulan II ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2021 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Masrokhan
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Gumiwang Kartasasmita
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Menteri Perindustrian



Agus Gumiwang Kartasasmita

Inspektur Jenderal



Masrokhan

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5 %
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	Rp2.000.000.000
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	Rp2.000.000.000
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	Rp2.000.000.000
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	Rp2.000.000.000
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	Rp32.643.630.000

Total Anggaran Tahun 2021 : Rp40.643.630.000

(Empat Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

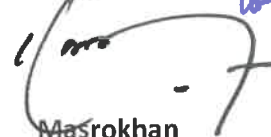
Menteri Perindustrian,



Agus Gumiwang Kartasasmita

Jakarta, Januari 2021

h Inspektur Jenderal



Masrokhani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liliek Widodo
Jabatan: Plt. Inspektur I

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Masrokhan
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Inspektur Jenderal



Masrokhan

Plt. Inspektur I



Liliek Widodo

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR I TAHUN 2021**

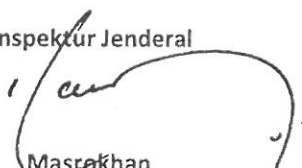
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat I *) IKU	1.4%
		S2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	8%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I	85%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti satker cakupan tugas Inspektorat I *) IKU	91,5%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I *) IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%

KEGIATAN

Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I

**ANGGARAN
Rp2,000,000,000**

Total Anggaran Tahun 2020 : Rp2,000,000,000
(Dua milyar rupiah)

Inspektur Jenderal

Masrokhani

Jakarta, Januari 2021
Pt. Inspektur I


Liliek Widodo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wawas Swathatafrijiah

Jabatan: Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Masrokhan

Jabatan: Inspektur Jenderal

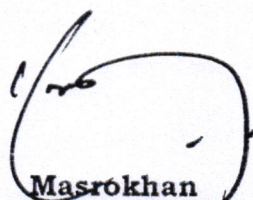
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 29 Januari 2021

Inspektur Jenderal



Masrokhan

Inspektur.II



Wawas Swathatafrijiah

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2021**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satuan kerja cakupan tugas	1.4%
		S2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91,5%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin*)IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%

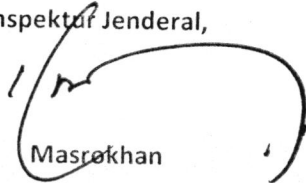
KEGIATAN

Pengawasan Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/KegiatanKementrian Prindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II

**ANGGARAN
Rp2,000,000,000**

Total Anggaran Tahun 2021 : **Rp2,000,000,000**
(Dua Milyar Rupiah)

Inspektur Jenderal,


Masrokh

Jakarta, 29 Januari 2021
Inspektur II


Wawas Swathatafrijiah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Liliek Widodo
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Masrokhan
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

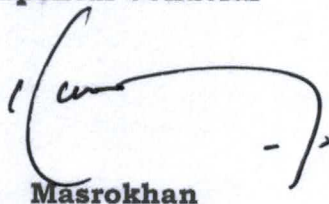
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2021

Inspektur Jenderal



Masrokhan

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Liliek Widodo

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	2 laporan
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	4 laporan
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	4 laporan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%
		Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	1 kegiatan
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *JIKU	Level 3 IACM
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN			
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Ketersediaan Sistem Informasi Pengawasan untuk audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25%
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55%
		Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	80%
		Ketersediaan data dan informasi pengawasan yang memadai	90%
		Komponen Pengungkit Penerapan Reformasi Birokrasi di unit Inspektorat Jenderal	91%
5	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%
		Kepatuhan terhadap kode etik auditor dalam menjalankan tugas pengawasan	92%
		Terselenggaranya layanan perkantoran Inspektorat Jenderal	12 Bulan Layanan

KEGIATAN

Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal

- Layanan Perkantoran
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
- Layanan Sarana Internal
- Layanan Pengawasan Internal
- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

ANGGARAN

Rp32,643,630,000

Rp25,107,244,000

Rp5,593,596,000

Rp590,000,000

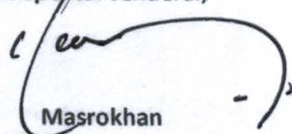
Rp568,290,000

Rp784,500,000

Total Anggaran Tahun 2021 : Rp32,643,630,000

(Tiga puluh dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Inspektur Jenderal,


Masrokhan

Jakarta, 2021
Sekretaris Inspektorat Jenderal


Liliek Widodo

Kegiatan Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Pilih Unit Kerja

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. S1 - Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian													
	S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,4 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%	28%	100 Persen
	Pagu = Rp. 8.099.133.000												
	S1.2 - Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	10%	90 Persen
	Pagu = Rp. 1.537.753.000												
	S1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	15%	0,1 Persen
	Pagu = Rp. 436.492.000												
	S1.4 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	91,5 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	8%	62 Persen
	Pagu = Rp. 8.090.084.000												
	Total Pagu = Rp. 18.163.462.000												
2. S2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
	S2.1 - Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	100 Persen
	Pagu = Rp. 464.866.000												
	S2.2 - Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	1 Level
	Pagu = Rp. 493.928.000												
	Total Pagu = Rp. 958.794.000												
3. S3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif													
	S3.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	21%	0 Persen
	Pagu = Rp. 1.461.346.000												
	S3.2 - Capaian IACM Itjen	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	3%	0 Level
	Pagu = Rp. 1.870.850.000												
	S3.3 - Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
	Pagu = Rp. 590.000.000												
	Total Pagu = Rp. 3.922.196.000												

Kegiatan Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Pilih Unit Kerja

4. S4 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

S4.1 - Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	15%	75 Persen
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----------

Pagu = Rp. 44.160.000

S4.2 - Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	85 Persen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------

Pagu = Rp. 76.300.000

S4.4 - Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0 Persen
---------------------------------------------------------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----------

Pagu = Rp. 11.036.000

S4.3 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	7%	0 Persen
--------------------------------------------------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----------

Pagu = Rp. 1.916.572.000

S4.5 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	1%	0 Persen
---------------------------------------------------------------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------

Pagu = Rp. 56.252.000

S4.6 - Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
-----------------------------------------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------

Pagu = Rp. 16.050.000

Total Pagu = Rp. 2.120.370.000

5. S5 - Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

S5.1 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%	21%	0 Persen
-------------------------------------------------------------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----------

Pagu = Rp. 68.200.000

S5.2 - Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------

Pagu = Rp. 13.000.000

S5.3 - Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	92 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
-----------------------------------------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------

Pagu = Rp. 26.000.000

S5.4 - Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	33%	0 Bulan Layanan
----------------------------	------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----------------

Pagu = Rp. 26.806.598.000

Total Pagu = Rp. 26.913.798.000